



.....
**EVALUASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI
KELURAHAN BASIRIH KOTA BANJARMASIN**

Oleh

Nada Zairina Wulandari¹⁾, Palupi Lindiasari Samputra²⁾

^{1,2}Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya 4, Kampus UI Salemba. DKI Jakarta Pusat, +62-213100059

E-mail: ¹nada.zairina@ui.ac.id, ²palupi.ls@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik demi pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian survei-pemakai, melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 100 responden keluarga di Kelurahan Basirih. Sarana dan prasarana termasuk unsur yang paling tidak memuaskan dengan nilai interval 1,87. Sedangkan unsur perilaku pelaksana dinilai kurang memuaskan juga dengan nilai 2,697 lebih tinggi dari unsur perilaku pelaksana. Hasil pengukuran SKM menunjukkan kinerja “tidak baik” atau tidak efektif dengan nilai 61,49, dan termasuk kategori mutu layanan pengelolaan sampahnya “D”. Untuk memperbaiki pelayanan, perlu adanya pemberian sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan adanya penambahan tempat sampah di sepanjang jalan pemukiman kelurahan Basirih. Serta perlu adanya sarana pemisahan sampah sesuai kriteria dan pengangkutan sampah dilakukan secara resmi oleh petugas kebersihan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sampah, Plastik, Survei Kepuasan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sampah plastik dapat mencemari lingkungan baik itu di daratan maupun di laut. Kontribusi besar sampah plastik berawal pada aktivitas masyarakat di darat yang pada akhirnya terbawa ke laut, pada kenyataannya jumlah plastik yang berasal dari daratan jauh lebih besar dibandingkan yang berasal dari kegiatan di laut sendiri. Sampah plastik berdampak negatif yang memiliki sifat yang sulit untuk terurai karena pembuatannya menciptakan racun dan bersifat karsinogenik dan memerlukan bertahun – tahun agar bisa terurai secara alami. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dengan laut sebesar dua per tiga dari wilayahnya, dengan memiliki populasi yang besar, memberikan kontribusi sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar.

Sampah plastik yang ada didunia sudah memproduksi sebanyak 8 milyar ton dan lebih dari setengahnya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah dan hanya sekitar 9% yang didaur ulang. Sebagian besar plastik yang tidak didaur ulang atau dikirim ke tempat pembuangan sampah berakhir di lautan. Diperkirakan setiap tahun 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik memasuki lautan setiap tahun (World Population Review, 2020).

Hal ini berpotensi buruk pada masyarakat Indonesia, apalagi keberadaan sumber daya manusia Indonesia, dimana 60% penduduknya dalam radius 50 km tinggal di pesisir pantai (Badan Pusat Statistik, 2016). Keberadaan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir pantai ini pun akan mendorong terjadinya aktivitas perdagangan, perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan, transportasi laut,



serta wisata bahari yang aktif. Sampah plastik dapat menghambat aktivitas pendapatan masyarakat, sebagai negara maritim, hal ini berpengaruh cukup besar dalam pembangunan berkelanjutan karena laut yang mencakup kepulauan nusantara, merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia. Sumber daya alam juga menjadi faktor penentu kepastian terwujudnya kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dalam kesatuan ketahanan dan akhirnya juga kesatuan pengamanan yang kukuh untuk kedepannya.

Mengurangi sampah plastik merupakan bentuk *support* pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) terutama pilar 12 untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, seperti mengupayakan sampah plastik ramah lingkungan dengan digunakan berulang *reude, reduce, recylce* dan pilar 11 poin 6 yang memiliki target di 2030 bisa mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, dengan menjaga kualitas udara seperti menangani sampah perkotaan (Sudirman & Phadiansah, 2019). Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk bisa mengurangi sampah plastik hingga 70% pada akhir 2025, dan pemerintah daerah mendukung visi tersebut dengan berbagai upaya agar dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Salah satunya di kota Surabaya, untuk mendapatkan tiket Suroboyo Bus tanpa membayar, penumpang bisa menukarkan dengan sampah plastik (Fauzi, 2018).

Evaluasi pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu yang dilakukan Syahriar Tato (Tato, 2015) juga menunjukkan bahwa sampah plastik yang menimbun di lingkungan masyarakat terjadi karena tidak seimbang produksinya yang meningkat dengan pengelolannya yang belum memadai. Akhirnya daya dukung alam menurun, menghasilkan kerusakan di bumi dan tidak bisa secara maksimal mendukung sebagai tempat pembuangan sampah. Pengelolaan persampahan dicocokkan antara kenyataan dilapangan dengan sarana

persampahan yang harus ada menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) yang akhirnya disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut kurang baik karena adanya permasalahan penumpukan sampah.

Pemerintah Banjarmasin sangat mendukung visi pembangunan berkelanjutan karena percaya bahwa sumber daya alam dan manusia perlu dijaga serta dilestarikan untuk memajukan keamanan dan kesejahteraan negara. Banjarmasin memiliki populasi berkisar 750 ribu jiwa yang memproduksi sampah setiap harinya hingga 600 ton yang 21,72 persennya adalah plastik (Azizah, 2020), menjadi sebuah *concern* yang cukup serius untuk pembangunan berkelanjutan kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin di kenal sebagai “kota seribu sungai” karena memiliki banyak sungai, kota ini keberadaannya 16 centimeter di bawah permukaan laut membuat intrusi air laut di sungai – sungai sering terjadi terutama pada musim kemarau dan sebagian masyarakatnya melakukan kegiatan di sungai. Sampah plastik yang kebanyakan berada di sungai – sungai besar dan sedang menjadi salah satu permasalahan serius untuk kota Banjarmasin karena menghambat aktivitas masyarakat, mengancam habitat dan kehidupan makhluk di bawah air, dan tentu akan mencemari air sungai yang akhirnya terhubung ke laut (Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin, 2016).

Adanya *concerns* inilah, pemerintah Banjarmasin menerapkan sebuah kebijakan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dengan adanya larangan penggunaan kantong plastik. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin, Dwi Naniek mengatakan bahwa pelarangan penggunaan kantong plastik sudah diterapkan di 341 ritel dan toko modern dan sembilan pasar tradisional (Azizah, 2020). Untuk pengurangan kantong plastik, pemerintah Banjarmasin juga membuat 276 unit bank sampah yang tersebar di 52



kelurahan yang dikelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) (Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin 2020). Kebijakan tersebut akhirnya diperluas penerapannya dengan mengeluarkan surat edaran ke sekolah – sekolah hingga rumah makan, Mini Market, Apotek, maupun kios – kios kecil (Normajatun & Haliq, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan 2016 ini, pada akhir tahun 2019 produksi sampah plastik dinyatakan meningkat dari 19,38 % ditahun 2018 menjadi 21,72%, padahal tagetnya dapat mengurangi produksi sampai 30% dan sisanya pengolahan sampah (Warga Niaga, 2019).

Kelurahan Basirih merupakan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Banjarmasin dengan desain sistem pengelolaan yang di terapkan adalah *Controlled Landfill* (Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin 2020). Adanya sampah plastik baik itu limbah dari barang – barang sehari – hari atau dari pangan, dapat merusak ketahanan lingkungan kedepannya. Perlu mengurangi sampah plastik demi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah juga menggunakan berbagai kebijakan untuk menguranginya, termasuk Pemerintah Daerah Banjarmasin. Dengan membentuk kebijakan Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2006, dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dengan latar belakang permasalahan mengenai produksi sampah masyarakat melebihi 500 ton per harinya dan hampir setengahnya adalah plastik menjadikan sampah sulit untuk ditampung dan dikelola. Kemudian, sampah plastik juga larut di sungai yang akhirnya menghambat aktivitas masyarakat. Maka, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik demi pembangunan berkelanjutan di Banjarmasin terutama kelurahan Basirih di tahun 2021. Dengan adanya evaluasi di Basirih, akan terlihat apakah kebijakan ini

perlu diteruskan atau diperbarui lagi sehingga bisa menekan angka jumlah plastik.

LANDASAN TEORI

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara sebagai cita – cita bangsa, berkaitan akan nilai maupun ideologi. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah runtutan perubahan yang mengalami keseimbangan yang dapat mengangkat kemungkinan untuk berkembang pada masa kini dan masa depan agar memenuhi kebutuhan, harapan dan tujuan manusia, seperti mengeksploitasi investasi, sumberdaya, perkembangan teknologi (Drajat Kartono & Hanif Nurcholis, 2016). Dalam laporan *Brundtland*, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan berbagai sektor yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan. Hal yang paling terpenting adalah melakukan perekonomian dan sosial dengan menjaga lingkungan. Pengelolaan kantong plastik merupakan salah satu aspek dalam membangun *sustainable development* di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Pemerintah Banjarmasin merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kantong plastik sudah menjadi salah satu permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari



hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup.

2. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi termasuk hal penting dalam menilai kebijakan pemerintah keluaran untuk sebuah daerah. Evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis seluruh proses kebijakan yang mencakup substansi, implementasi maupun dampak. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi keputusan teoritis yang menggunakan metode – metode deskriptif agar bisa menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam perilaku kebijakan. Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal atau diam – diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai (Dunn, 2017)

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dengan jenis penelitian survei, instrumennya berupa wawancara dan mengisi kuesioner elektronik berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berdasarkan pada Permen PAN Nomor 14 Tahun 2017, yang hasilnya akan memberikan informasi untuk melengkapi penaksiran evaluabilitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang berarti untuk memproduksi informasi manfaat hasil kebijakan. Induktif dalam mengumpulkan data, interpretasi dan penyajian laporan. Dengan teknik analisis survei – pemakai sebagai bentuk prosedur untuk mengumpulkan informasi mengenai evaluabilitas kebijakan dari calon pengguna maupun pelaku kebijakan lainnya (Dunn, 2017).

Hasil survei akan diambil secara acak pada masyarakat di wilayah Banjarmasin Barat, Kelurahan Basirih. Kelurahan Basirih menjadi fokus evaluasi karena adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan hampir semua RT disediakan tempat sampah. Jumlah responden akan dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N e^2 + 1)} \quad (1)$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = nilai kritis yang diinginkan (batas ketelitian), sebesar 10% (presentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel)

$$n = \frac{(25.349)}{((1 + (\lfloor 25.349 \times 0.1 \rfloor^2))} \\ = 99,6 = 100 \text{ responden} \quad (2)$$

Berdasarkan survei – pemakai, dengan populasi berkisar 25.349 dari 50 RT di Kelurahan Basirih (Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Barat, 2018) sampel terpilih sebanyak 100 responden sebagai perwakilan dari populasi yang ada. Kuesioner berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat berupa persepsi responden dengan skala likert 1-4, dengan jawaban Sangat memuaskan skor 4; Memuaskan skor 3; Kurang Memuaskan skor 2; dan Tidak Memuaskan skor 1. Untuk mengukur hasil SKM, rumus akan digunakan berdasarkan Permen PAN Nomor 14 tahun 2017, sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur})}{(\text{Total Unsur yang Terisi})} \times \text{Nilai Penimbang} \quad (3)$$

Untuk mengukur “nilai rata – rata penimbang” dari 9 unsur pertanyaan dalam Survei Kepuasan Masyarakat, dihitung melalui rumus (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2017) Bobot nilai rata – rata tertimbang = (Jumlah Bobot)/(Jumlah unsur) = $1/x = N = 1/9 = 0,11$, dengan N sebagai bobot nilai per unsur.



Untuk menyederhanakan penafsiran terhadap penilaian SKM antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25. Nilai rata – rata per unsur pelayanan didapatkan dengan, jumlah nilai masing – masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Kemudian, untuk indek per unsur pelayanan didapatkan dari nilai rata – rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 dan dijumlahkan semuanya. Setelah mendapatkan hasil indeks, untuk mendapatkan nilai SKM yang telah dikonversi dengan nilai indeks dikalikan nilai dasar (25). (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2017). Nilainya akan ditetapkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Peyanan dan Kinerja Unit

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan(x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN Nomor 14 Tahun 2017

Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Penilaian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS Statistic 26 dengan teknik Korelasi Product Moment (Halin, 2018). Uji validitas merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui tingkat kevalidan dari kuesioner yang disebarkan sebagai suatu instrumen pengumpulan data kepuasan masyarakat di Kelurahan Basirih terhadap kebijakan pengurangan penggunaan sampah. Pada uji validitas *pearson* ini, N tidak akan dikurangi dua (2) dalam menentukan r tabel karena

untuk menghindari ketidak konsistenan dalam hasil uji validitas *pearson*.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	Kolerasi
1	0,563
2	0,591
3	0,491
4	0,248
5	0,576
6	0,490
7	0,318
8	0,489
9	0,605
10	0,681
11	0,685
12	0,528
13	0,647
14	0,629
15	0,516
16	0,367
17	0,661
18	0,545
19	0,165
20	0,599
21	0,623
22	0,790
23	0,771
24	0,737
25	0,599
26	0,492
27	0,560
28	0,355

Sumber: Data olahan dengan SPSS 26 (2021)

Hasil akan dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dibandingkan r tabel dan dianggap sah sebagai pengumpul data. Dengan jumlah responden (N) 100 di ketahui r tabel dengan signifikasi 0,05 adalah 0,1946. Dapat diketahui bahwa hasil setiap item pertanyaan kepuasan masyarakat kecuali pertanyaan nomor 19 dinyatakan valid karena hasil melebihi dari r tabel. Jadi, kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dapat dinyatakan akurat.

Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kehandalan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Perlu untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner, karena kuesioner digunakan untuk mengukur variable penelitian. Peneliti akan menggunakan *alpha cronbach's* sebagai penguji realibilitas, hasilnya akan mengacu pada nilai *alpha* yang ada di dalam tabel SPSS. Jika nilai *Cronbach's*



α lebih dari 0,60 maka kuesioner dapat dinyatakan handal atau reliabel sebagai pengumpul data (Raharjo, 2019).

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0
Cronbach's Alpha		N of Items	
,910		28	

Se telah diinterpretasikan, hasil dari uji reliabilitas adalah valid 100 persen, dengan statistik reliabilitasnya 0,910, yang artinya melebihi dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner untuk SKM pada kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah reliabel atau dapat dihandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei pengelolaan sampah plastik dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam mengurangi efek negatif sampah plastik. Dengan adanya survei kepuasan masyarakat, penulis bisa mengetahui cara pemerintah Banjarmasin menangani permasalahan sampah plastik yang ada di jalan maupun di sungai serta seberapa efektif himbauan dan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Jadi, survei kepuasan masyarakat mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kelurahan Basirih juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terkait pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari – hari masyarakat yang ditetapkan pemerintah. Hasil survei yang dilakukan per indikator yaitu:

Tabel 4 Nilai Rata – Rata dan Peringkat Setiap Indikator Survei Kepuasan Masyarakat terhadap PERWALI nomor 18 tahun 2016

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	Nilai Interval	Peringkat
1	Persyaratan	2,404	Tidak Baik	8
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	2,600	Kurang Baik	3
3	Waktu Penyelesaian	2,595	Tidak Baik	4
4	Biaya/ Tarif	2,676	Kurang Baik	2
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,587	Tidak Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	2,463	Tidak Baik	7
7	Perilaku Pelaksana	2,697	Kurang Baik	1
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,500	Tidak Baik	6
9	Sarana dan Prasarana	1,877	Tidak Baik	9

Analisis Persyaratan

Hasil survei yang diperoleh, rata – rata nilai indikator persyaratan adalah 2,404 yang nilai intervalnya berada di antara 1,00 – 2,5996 atau di kategorikan “tidak baik”. Hal yang diakui masyarakat adalah mereka mendapatkan himbauan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kepuasan terendah terdapat pada kinerja bank sampah untuk mengelola plastik di lingkungan Kelurahan Basirih. Saat observasi dilakukan oleh penulis, bank sampah yang ada di Basirih terlihat tidak berjalan lancar karena masyarakat lebih memilih menjual sampah yang mereka kumpulkan ke perusahaan swasta yang harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan pihak bank sampah pemerintah Banjarmasin. Dengan sepiya pelanggan yang datang, pemasukan bank sampah mengalami penurunan dan tidak bisa bertahan lama.

Masyarakat mengakui bahwa mereka perlu membayar iuran kebersihan setiap bulan untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga. Beberapa responden



menyatakan bahwa mereka mengelola sampah rumah tangganya sendiri karena memang tidak ada pelayanan pengelolaan sampah di lingkungannya dan ada beberapa responden tidak sanggup membayar iuran pengelolaan sampah per bulannya. Berdasarkan kuesioner kepuasan masyarakat, hasil unsur persyaratan yaitu: Pembayaran iuran kebersihan setiap bulan untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah (tidak baik), Setiap Rukun Tetangga (RT) di Basirih disediakan tempat sampah (tidak baik), Setiap rumah memiliki tempat sampah di depan rumah (tidak baik), Pemerintah membuka bank sampah untuk mengelola plastik di Kelurahan Basirih (tidak baik), Pemerintah memberikan himbauan untuk mengurangi penggunaan plastik (tidak baik).

Analisis Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Hasil survei yang diperoleh, rata – rata nilai indikator sistem, mekanisme dan prosedur adalah 2,60 yang nilai intervalnya berada di antara 2,60 – 3,034 atau di kategorikan “kurang baik”. Kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik diterapkan dengan baik di toko – toko *modern* seperti Indomaret atau di *mall*, dengan menerapkan pelarangan penggunaan plastik saat berbelanja. Pemerintah Banjarmasin juga sudah memberikan himbauan pada penjual atau pembeli di pasar – pasar tradisional, maupun toko swalayan untuk menggunakan tas belanja atau tas purun saat berbelanja dibandingkan kantong plastik, tetapi masyarakat masih merasa kesulitan untuk mengikuti himbauan tersebut. Saat melakukan observasi, penulis menyadari bahwa pemerintah ataupun petugas kebersihan belum rutin mengawasi berjalannya kebijakan PERWALI ini, dan kebijakan tidak memberikan sanksi atau efek jera untuk pelanggaran kebijakan. Berdasarkan kuesioner, hasil unsur ini yaitu: Pemerintah memberikan sosialisasi/himbau mengenai kebijakan pengurangan penggunaan plastik (tidak baik),

Toko modern serta pasar menerapkan pelarangan menggunakan plastik dan di ganti dengan tas belanja (baik), Pemerintah/ petugas lingkungan hidup melakukan pengawasan dalam penggunaan kantong plastik di daerah perbelanjaan (tidak baik).

Waktu Penyelesaian

Hasil survei yang diperoleh, rata – rata nilai indikator waktu penyelesaian yang diperlukan petugas kebersihan adalah 2,595 yang nilai intervalnya berada di antara 1,00 – 2,5996 atau di kategorikan “tidak baik”. Secara keseluruhan, petugas kebersihan di Basirih masih belum memuaskan masyarakat dalam waktu penyelesaian tugasnya. Faktor terbesarnya adalah kebanyakan petugas masih menggunakan gerobak untuk melakukan pengambilan sampah. Adanya faktor tersebut, membuat waktu pengelolaan sampah berjalan dengan lambat. Hasil unsur ini yaitu petugas kebersihan melakukan pengambilan sampah 3 kali per minggu setiap RT (tidak baik), serta ketepatan waktu dalam pengangkutan sampah yang dilakukan petugas kebersihan (tidak baik).

Biaya/Tarif

Hasil survei yang diperoleh untuk unsur biaya rata – rata nilainya adalah 2,67 yang nilai intervalnya berada di antara 2,60 – 3,034 atau di kategorikan “kurang baik”. Indikator besaran jumlah iuran per bulan terjangkau bagi rumah tangga mendapatkan rata – rata tertinggi, sedangkan biaya yang dikeluarkan masyarakat sepadan dengan kinerja petugas sampah mendapatkan rata – rata terendah. Hal ini dikarenakan petugas masih menggunakan alat - alat yang sedikit untuk mengelola sampah, yang apabila dibandingkan dengan iuran yang dibayarkan dengan kisaran 30 hingga 50 ribu rupiah per bulannya. Berdasarkan kuesioner, hasil unsur biaya adalah penetapan jumlah iuran sampah per bulan ditetapkan secara musyawarah (kurang baik). Besaran jumlah iuran per bulan terjangkau bagi rumah tangga (kurang baik).



Kemudian, biaya yang dikeluarkan sepadan dengan kinerja petugas sampah (kurang baik).

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil survei pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan memiliki nilai rata-rata 2,58 yang nilai intervalnya berada di antara 1,00 – 2,599 atau di kategorikan “tidak baik”. Hasil dari kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi produksi plastik yang diberikan pemerintah dan diterima masyarakat diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan sampah, dapat diharapkan lingkungan bersih dari sampah terutama sampah plastik. Pemerintah kelurahan Basirih selalu berusaha membersihkan sungai, bahkan dua tahun terakhir sungai di kelurahan Basirih mendapatkan juara kebersihan sungai dari pemerintah kota Banjarmasin yang di adakan setiap tahunnya.

Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai, meskipun masyarakat menyadari hal tersebut tidak baik untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan kuesioner yang sudah disebar hasil pada unsur ini adalah kebersihan dan kenyamanan lingkungan bisa dirasakan oleh masyarakat (kurang baik). Sungai yang ada di area kelurahan Basirih bersih dari sampah plastik (tidak baik), dan di sekolah/tempat kerja menggunakan gelas atau tumbler untuk minum dibandingkan menggunakan botol plastik (kurang baik).

Kompetensi Pelaksana

Hasil survei pada unsur kompetensi pelaksana memiliki nilai rata-rata 2,46 yang nilai intervalnya berada di antara 1,00 – 2,5996 atau di kategorikan “tidak baik”. Masyarakat menilai kemampuan yang dimiliki oleh petugas kebersihan, jadi petugas diharapkan memiliki keahlian, keterampilan maupun pengalaman dalam pengelolaan sampah terutama plastik. Indikator Sampah yang sudah dikumpulkan ditempatkan di tempat sampah sementara (TPS) oleh petugas memiliki nilai rata-rata sedang sedangkan aktivitas pembakaran sampah mendapatkan nilai rata-rata terendah.

Di kelurahan Basirih, aktivitas pembakaran sampah berjalan cukup sering karena sampah – sampah rumah tangga tidak dapat dibendung lagi, bahkan sebagian sampah sudah dikirimkan petugas ke tempat sampah sementara (TPS) di kelurahan lainnya. Majoritas masyarakat merasa terganggu dengan asapnya yang menghalangi aktivitas, kenyamanan, dan kesehatan. Pembakaran sampah ini menjadi jalan terakhir karena adanya penumpukan sampah yang tidak terbendung, apalagi Tempat Sampah Akhir (TPA) sudah mencapai kapasitas maksimal hingga lima tahun kedepan yang artinya TPA tidak bisa menerima sampah lagi.

Faktanya sampah – sampah yang dibakar mengandung banyak plastik dan menghasilkan karbon monoksida cukup besar yang berakhir pada efek rumah kaca. Petugas menyadari pembakaran sampah adalah hal yang tidak baik untuk lingkungan, tetapi petugas menyatakan tidak ada jalan lagi selain pembakaran karena sampah akan tertumpuk di tepi jalan. Salah satu alasan mengapa permasalahan ini sulit ditangani adalah kurangnya sumber daya manusia di kelurahan untuk menangani sampah rumah tangga. Pada kuesioner terdapat poin petugas memiliki keahlian dan rajin saat membersihkan lingkungan (kurang baik), sampah yang sudah dikumpulkan ditempatkan di tempat sampah sementara (TPS) oleh petugas (kurang baik), dan terdapat aktivitas pembakaran sampah (tidak baik)

Perilaku Pelaksana

Hasil survei yang diperoleh menunjukkan rata-rata nilai indikator biaya adalah 2,69 yang nilai intervalnya berada di antara 2,60 – 3,034 atau di kategorikan “kurang baik”. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah petugas kebersihan sopan dan ramah sedangkan petugas kebersihan cepat tanggap dalam membersihkan sampah di lingkungan masyarakat mendapatkan nilai rata-rata terendah. Dengan hasil, Ketika menjalankan tugas, petugas kebersihan dapat berlaku adil (kurang baik), etugas kebersihan sampah



sopan dan ramah (kurang baik), serta petugas kebersihan cepat tanggap dalam membersihkan sampah di lingkungan Basirih (tidak baik).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil survei menunjukkan nilai rata-rata 2,50 yang nilai intervalnya berada di antara 1,00 – 2,5996 atau di kategorikan “tidak baik”. Kedua indikator memiliki nilai rata-rata yang tidak jauh berbeda, yang berarti pengaruh indikator merata dalam unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kepuasan masyarakat dalam survei poin ini yaitu: Petugas cepat tanggap dalam menangani pengaduan, saran, dan masukan (tidak baik), Petugas kebersihan dapat menerima saran dan masukan dari masyarakat (tidak baik).

Sarana dan Prasarana

Nilai rata-rata hasil jawaban kuesioner dari sarana dan prasarana adalah sebesar 1,87 yang berada pada interval 1,00 – 2,5996 atau di kategorikan “tidak baik”. Dalam basis pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengupayakan sampah plastik ramah lingkungan dengan menerapkan *reude, reduce, recylce*. Sampah rumah tangga akan lebih baik dipilah berdasarkan jenisnya. Di kelurahan Basirih, masyarakat menilai ketersediaan sarana tempat sampah 3R (*reude, reduce, recylce*) pada daerah pemukiman masih sangat kurang, alhasil masyarakat masih membuang sampahnya dengan plastik tanpa adanya pemilahan. Kebanyakan masyarakat juga masih kesulitan membedakan mana sampah yang bisa daur ulang atau tidak, dan mana yang berbahaya.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu anggota kelurahan Basirih, ditemukan bahwa kelurahan Basirih tidak memiliki Tempat Sampah Sementara (TPS) seperti lahan atau kontainer. Terdapat kesulitan untuk bisa menemukan lahan kosong atau kontainer agar dapat digunakan sebagai TPS, kebanyakan warga menolak tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat sampah. Alhasil kebanyakan masyarakat masih

membuang sampah rumah tangga di tepi jalan besar kelurahan Basirih, akhirnya petugas pun harus membakar sampah tersebut. Kepuasan masyarakat untuk pemerintah daerah menyediakan tempat sampah di lingkungan pemukiman dinilai tidak baik. Pemerintah daerah menyediakan tempat sampah 3R di pemukiman (tidak baik), tersedianya penutup tempat sampah di setiap RT (tidak baik), serta pemerintah daerah menyediakan TPS lahan atau kontainer (tidak baik).

Berdasarkan hasil survei keseluruhan, dan dari hasil perhitungan nilai rata-rata per unsur pelayanan diketahui bahwa hampir keseluruhan unsur memiliki nilai interval tidak baik pada Survei Kepuasan Masyarakat. Unsur sistem, mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, serta perilaku pelaksana di nilai lebih baik dari unsur lainnya. Hasil dari pertanyaan terbuka diketahui bahwa dari 100 responden, ada sebanyak 57 responden yang menyatakan aktivitas pembakaran sampah di kelurahan Basirih mengganggu aktivitas dan mengganggu pernafasan sehari-harinya. Kenyamanan dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu penilaian kepuasan masyarakat, karena indikator ini mempengaruhi pembangunan berkelanjutan kelurahan Basirih.

Demi mendapatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai indeks unit pelayanan. Diperoleh dengan dengan cara mengalikan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan kemudian dikalikan dengan 0,11 (bobot nilai rata-rata tertimbang dari 9 unsur), lalu dikalikan dengan nilai dasar yaitu 25, caranya sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 &(2,40 \times 0,11) + (2,60 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,59 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,67 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,58 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,46 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,69 \times 0,11) \\
 &\quad + (2,50 \times 0,11) \\
 &\quad + (1,87 \times 0,11) = 2,4596 \\
 &\quad (4)
 \end{aligned}$$

PENUTUP

Kesimpulan

- Berdasarkan penelitian dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Basirih, diketahui nilai indeks unit pelayanan untuk mengurangi penggunaan plastik hasilnya adalah 2,45. Kemudian, untuk mengetahui Nilai SKM setelah dikonversi dihitung dengan Nilai Indeks dikali Nilai Dasar (25), hasilnya sebesar **61,49**. Berdasarkan pada metode penelitian, hasil dari nilai interval konversi 61,49 berada antara 25,00 – 64,99, yang menunjukkan mutu **tingkat pelayanan D** atau kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah tidak baik atau **tidak memuaskan**.

Saran

- Pemerintah perlu memaksimalkan kebijakan PERWALI nomor 18 tahun 2016 dengan benar – benar mensosialisasikan secara aktif gerakan tanpa kantong plastik saat berbelanja dipasar tradisional dan lainnya.
- Memberikan tindakan tegas pada pedagang atau produsen yang masih menggunakan plastik. Perlu membuat pemberitahuan yang lebih besar tentang bahayanya plastik itu pada lingkungan hidup, buat harga plastik menjadi lebih mahal agar para pengguna tidak menganggap remeh. Pemerintah lebih baik menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.
- Masyarakat tiap RT juga bisa diberikan bimbingan untuk mengelola sampah kembali agar masyarakat lebih produktif.

- Mengaktifkan bank sampah di banyak tempat dengan harga yang dapat bersaing dengan tempat lainnya.
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemisahan sampah, karena umumnya ketika masyarakat membuang sampah mereka menggunakan plastik sebagai pembungkus sampah, selain itu mencampur dan tidak memisahkan sampah menghambat masyarakat menyadari sebanyak apa sampah yang sulit terurai yang mereka buang (memicu sikap *ignorant*), dan sampah yang bercampur menjadi sulit untuk di *recycle*.
- Adanya penelitian lebih lanjut dengan lingkup yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Population Review. (2020). Plastic Pollution by Country 2020. Retrieved from Plastic Pollution by Country 2020 website: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/plastic-pollution-by-country>, diakses pada 20 April 2021
- [2] Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2016* (Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- [3] Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- [4] Fauzi, A. (2018). Indonesia Darurat Sampah Plastik. Retrieved November 28, 2020, from <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik>, diakses pada 5 Oktober 2021.
- [5] Tato, S. (2015). Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu. *Jurnal Plano Madani*, 4(2), 65–79.
- [6] Azizah, N. (2020). Kota Banjarmasin Kian Ramah Kantong Plastik. Retrieved from Republika website: <https://republika.co.id/berita/daerah/kalim>



- antan/qiaq1u463/kota-banjarmasin-kian-ramah-kantong-plastik
- [7] Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin. (2016). Peta Sungai Kota Banjarmasin / 102 Sungai. Retrieved from <https://sdad.banjarmasinkota.go.id/2016/09/peta-sungai-kota-banjarmasin-102-sungai.html>, diakses pada 23 April 2021.
- [8] Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. (2020). Inovasi Program dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Retrieved from <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/03/inovasi-program-dan-kegiatan.html>, diakses pada 23 April 2021.
- [9] Normajatun, N., & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 5(2), 55–63. Retrieved from <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3517>
- [10] Warga Niaga. (2019). Sampah Plastik di Banjarmasin Membeludak. Retrieved from <https://wartaniaga.com/2019/10/sampah-plastik-di-banjarmasin-membeludak/>, diakses pada 20 November 2020.
- [11] Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. (2020b). Profil TPA Basirih. Retrieved from <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/07/profil-tpa-basirih.html>, diakses pada 22 april 2021.
- [12] Drajat Kartono, & Hanif Nurcholis. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 1–52.
- [13] Dunn, W. (2017). Public Policy Analysis: An Introduction. In *Pearson*. <https://doi.org/10.2307/3550585>
- [14] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. [https://doi.org/10.1016/0014-4827\(75\)90518-2](https://doi.org/10.1016/0014-4827(75)90518-2)
- [15] Halin, H. (2018). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Semen Baturaja di Palembang Pada PT Semen Baturaja (PERSERO) Tbk. *EcoMent Global*, 3(Nomor 2), 167–182. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publication/s/287457-pengaruh-kualitas-produk-terhadap-kepuas-6ed5c99b.pdf>
- [16] Raharjo, S. (2019). Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's dengan SPSS. Retrieved from <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html>, diakses pada 23 April 2021.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN